
Studi Perbandingan Manajemen Kebijakan Publik Di Indonesia Dan Singapura: Tinjauan Tata Kelola, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan

Mariatul Qibtia
Universitas Yudharta Pasuruan
Email: *mariatulqibtia0210@gmail.com*

Abstract

Public policy management is a crucial element in determining the effectiveness of government policies, particularly in ensuring that policies do not stop at the formulation of regulations but rather generate real impacts for the public. This article aims to provide a comparative analysis of public policy management in Indonesia and Singapore, emphasizing aspects of policy planning, institutional structure, coordination, implementation, and policy evaluation. The research approach used is library research using descriptive-comparative analysis of various scientific literature and journal references related to public administration and public sector management reform. The results indicate that Indonesia has advantages in terms of openness to public participation and democratic mechanisms in the policy process, but still faces challenges in consistent implementation due to the complexity of decentralization, variations in bureaucratic capacity across regions, and the tendency toward administrative policy evaluation. In contrast, Singapore demonstrates a more integrated and stable policy character through a professional and meritocratic bureaucracy, strong cross-agency coordination, and outcome-oriented, data-driven evaluation. This article concludes that differences in government structure, bureaucratic capacity, and governance culture are key factors shaping the effectiveness of policy management in the two countries. The study's implications emphasize the importance of strengthening outcome-based evaluation, integrating policy data, and central-regional coordination as an agenda for reforming public policy management in Indonesia.

Keywords: *Comparison, Policy, Indonesian Public, Singapore*

Abstrak

Manajemen kebijakan publik merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas kebijakan pemerintah, khususnya dalam memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada perumusan regulasi, melainkan mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan manajemen kebijakan publik di Indonesia dan Singapura dengan menekankan aspek perencanaan kebijakan, struktur kelembagaan, koordinasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif-komparatif terhadap berbagai literatur ilmiah dan referensi jurnal terkait administrasi publik dan reformasi manajemen sektor publik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam hal keterbukaan partisipasi publik dan mekanisme demokrasi dalam proses kebijakan, namun masih menghadapi tantangan pada konsistensi implementasi akibat kompleksitas desentralisasi, variasi kapasitas birokrasi antardaerah, serta evaluasi kebijakan yang cenderung administratif. Sebaliknya, Singapura menunjukkan karakter kebijakan yang lebih terintegrasi dan stabil melalui birokrasi profesional dan meritokratis, koordinasi lintas lembaga yang kuat, serta evaluasi berbasis data yang berorientasi pada outcome. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbedaan struktur pemerintahan, kapasitas birokrasi, serta budaya tata kelola menjadi faktor utama yang membentuk efektivitas manajemen kebijakan di kedua negara. Implikasi kajian menekankan pentingnya penguatan evaluasi berbasis outcome, integrasi data kebijakan, serta koordinasi pusat-daerah sebagai agenda pembaruan manajemen kebijakan publik di Indonesia.

Kata Kunci: Perbandingan, Kebijakan, Publik Indonesia, Singapura

Pendahuluan

Manajemen kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk memastikan kebijakan pemerintah dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara efektif. Dalam konteks administrasi publik modern, kebijakan publik tidak cukup diukur dari tersusunnya peraturan atau program, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik secara nyata. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan institusi pemerintah dalam mengelola siklus kebijakan mulai dari agenda setting, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan (Howlett & Ramesh, 2003). Oleh karena itu, manajemen kebijakan publik menuntut sinergi antara kapasitas birokrasi, koordinasi lintas sektor, serta orientasi kinerja yang berfokus pada dampak kebijakan. Kajian perbandingan kebijakan publik menjadi penting karena memberikan gambaran bagaimana praktik tata kelola suatu negara dapat menghasilkan efektivitas kebijakan yang berbeda.

Indonesia dan Singapura kerap dibandingkan karena berada dalam kawasan Asia Tenggara dengan karakter pembangunan yang berbeda. Indonesia sebagai negara demokratis dengan wilayah luas dan struktur pemerintahan desentralistik menghadapi tantangan kompleksitas koordinasi pusat–daerah, variasi kapasitas aparatur, dan dinamika politik lokal yang memengaruhi jalannya kebijakan. Sebaliknya, Singapura sebagai negara kota memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih terpusat dengan birokrasi profesional, sehingga lebih mampu menjaga konsistensi perencanaan dan implementasi kebijakan (Neo & Chen, 2007). Perbedaan karakter ini memunculkan pertanyaan mengenai faktor utama yang memengaruhi efektivitas manajemen kebijakan pada kedua negara. Selain itu, tantangan utama manajemen kebijakan publik pada negara berkembang sering ditemukan pada aspek implementasi dan evaluasi.

Banyak kebijakan berhasil pada tahap perencanaan namun lemah dalam pelaksanaan karena lemahnya kapasitas institusi, resistensi birokrasi, atau pengaruh kepentingan aktor lokal. Grindle (1997) menyebut bahwa perbedaan kapasitas organisasi publik di negara berkembang dapat menciptakan kesenjangan besar antara rancangan kebijakan dan hasil yang dicapai. Oleh sebab itu, studi ini relevan untuk melihat bagaimana struktur pemerintahan dan budaya birokrasi memengaruhi keberhasilan kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan manajemen kebijakan, terutama di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk membandingkan manajemen kebijakan publik Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada perencanaan kebijakan, koordinasi kelembagaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pembelajaran kebijakan (policy lessons) sebagai kontribusi pemikiran bagi reformasi administrasi publik dan peningkatan tata kelola kebijakan di Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif-komparatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel penelitian yang membahas manajemen kebijakan publik, implementasi kebijakan, reformasi manajemen publik, serta tata kelola pemerintahan Indonesia dan Singapura. Teknik analisis dilakukan dengan membandingkan indikator manajemen kebijakan publik pada kedua negara berdasarkan tahapan siklus kebijakan, meliputi perencanaan dan perumusan, struktur kelembagaan dan koordinasi, implementasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi.

Hasil Dan Pembahasan

A. Kerangka Teoritis: Policy Instrument Theory

Policy Instrument Theory (Teori Instrumen Kebijakan) menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak cukup dipahami sebagai keputusan atau peraturan, melainkan sebagai serangkaian pilihan instrumen (tools) yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Instrumen kebijakan merupakan mekanisme intervensi negara untuk memengaruhi perilaku aktor target (masyarakat, organisasi, sektor swasta, pemerintah daerah) agar sejalan dengan arah kebijakan. Karena itu, fokus teori ini adalah menjawab pertanyaan: “alat apa yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan, bagaimana instrumen itu dikelola, dan apa dampaknya terhadap hasil kebijakan?” Dalam konteks studi perbandingan Indonesia dan Singapura, teori ini relevan karena keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian instrumen dengan karakter tata kelola, kapasitas birokrasi, dan sistem implementasi pada masing-masing negara. Indonesia yang desentralistik cenderung memiliki variasi kapasitas implementasi antar daerah, sedangkan Singapura yang lebih terpusat cenderung mampu menerapkan instrumen secara lebih konsisten dan terstandar. Perbedaan tersebut membuat analisis instrumen kebijakan menjadi kunci untuk menjelaskan perbedaan kinerja kebijakan di kedua negara.

B. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan

Perencanaan kebijakan publik di Indonesia berlangsung dalam sistem demokrasi yang memberi ruang partisipasi publik relatif luas. Mekanisme perencanaan pembangunan seperti musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan (RPJMN, RPJMD) menunjukkan bahwa proses kebijakan di Indonesia melibatkan berbagai aktor baik formal maupun informal. Namun demikian, kompleksitas aktor dan kepentingan sering membuat proses perencanaan tidak selalu berjalan efektif karena lemahnya sinkronisasi pusat dan daerah serta potensi tumpang tindih program lintas sektor. Dalam banyak kasus, dokumen perencanaan menjadi formalitas administratif sehingga tidak sepenuhnya menjadi pedoman implementasi kebijakan di lapangan (Turner et al., 2009). Berbeda dengan Indonesia, Singapura menekankan perencanaan kebijakan secara terintegrasi dan teknokratis dengan dukungan data dan analisis kebijakan yang kuat. Singapura dikenal menerapkan pendekatan dynamic governance yang memungkinkan kebijakan dirancang adaptif namun tetap konsisten dan terukur. Integrasi perencanaan pada tingkat pemerintah pusat membuat Singapura lebih efektif menjaga arah kebijakan sesuai tujuan strategis negara (Neo & Chen, 2007). Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas perencanaan kebijakan sangat ditentukan oleh struktur koordinasi kelembagaan dan kapasitas manajerial birokrasi.

C. Struktur Kelembagaan dan Koordinasi Kebijakan

Indonesia sebagai negara desentralistik memiliki struktur kelembagaan yang kompleks karena pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam manajemen kebijakan publik, kompleksitas ini menghasilkan tantangan koordinasi lintas instansi, baik antar kementerian maupun pusat–daerah. Peters (2015) menekankan bahwa koordinasi kebijakan memerlukan mekanisme yang jelas agar kebijakan lintas sektor tidak terfragmentasi. Namun, pada konteks Indonesia, koordinasi sering mengalami hambatan ego sektoral, perbedaan prioritas pembangunan daerah, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan yang berdampak pada ketidaksamaan kualitas layanan publik antarwilayah. Singapura menunjukkan koordinasi kelembagaan yang lebih efektif karena sistem pemerintahan terpusat dengan struktur birokrasi yang lebih sederhana. Mekanisme koordinasi lebih kuat karena sistem administrasi publik mengutamakan efisiensi dan kepatuhan birokrasi. Selain itu, Singapura membangun birokrasi

meritokratis yang memperkuat profesionalisme aparatur, sehingga kebijakan lebih mudah dilaksanakan secara konsisten di seluruh sistem pemerintahan (Quah, 2010). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa koordinasi kelembagaan merupakan faktor utama yang memengaruhi konsistensi implementasi kebijakan.

D. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap paling krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Indonesia menghadapi tantangan implementasi yang cukup besar akibat perbedaan kapasitas birokrasi dan sumber daya antardaerah. Kesenjangan kapasitas tersebut menyebabkan kebijakan yang dirancang baik di pusat belum tentu berjalan efektif ketika diterapkan di daerah. Grindle (1997) menegaskan bahwa dalam negara berkembang, implementasi sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal, keterbatasan sumber daya, serta resistensi birokrasi. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan di Indonesia sering berhasil dalam mencapai output administratif seperti penyerapan anggaran, namun belum selalu menghasilkan outcome berupa dampak nyata bagi masyarakat. Singapura memiliki karakter implementasi kebijakan yang lebih disiplin karena sistem kontrol birokrasi yang ketat, indikator kinerja yang jelas, serta budaya pelayanan publik yang menekankan kualitas layanan. Implementasi kebijakan di Singapura didukung oleh sistem pengendalian manajerial dan penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, reformasi administrasi publik di Singapura menjadikan efisiensi dan orientasi hasil sebagai fondasi utama, sehingga kebijakan lebih cepat menghasilkan outcome yang dirasakan oleh masyarakat (Neo & Chen, 2007).

E. Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas

Indonesia telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi melalui mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah, seperti SAKIP serta audit kinerja. Akan tetapi, evaluasi kebijakan di Indonesia masih dominan bersifat administratif dan cenderung berorientasi pada output, bukan outcome. Pollitt dan Bouckaert (2017) menyebut bahwa reformasi manajemen publik sering menghadapi kendala ketika evaluasi hanya menjadi formalitas pelaporan dan tidak digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Selain itu, keterlibatan publik dalam evaluasi kebijakan juga masih relatif rendah sehingga akuntabilitas kebijakan belum sepenuhnya kuat. Singapura, di sisi lain, menonjol dalam evaluasi berbasis data dan evidence-based policy. Sistem e-government dan integrasi layanan publik juga meningkatkan efektivitas monitoring karena proses kebijakan dapat dikontrol secara real time dan transparan (Kim & Lee, 2012). Evaluasi di Singapura lebih menekankan hasil kebijakan dan kualitas layanan, sehingga akuntabilitas birokrasi lebih kuat secara manajerial.

Dengan demikian, efektivitas evaluasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya instrumen formal, melainkan juga oleh budaya birokrasi dan integrasi sistem data pemerintahan. Singapura memiliki sistem evaluasi yang lebih berbasis data dan evidence-based policy, dengan orientasi kuat pada efisiensi serta hasil akhir kebijakan. Sistem e-government dan integrasi layanan publik juga memperkuat kepercayaan dan efektivitas kebijakan karena mendukung transparansi proses serta kualitas pelayanan (Kim & Lee, 2012). Dalam konteks akuntabilitas, Singapura menekankan akuntabilitas manajerial yang kuat, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan akuntabilitas yang sering kali bersifat formalistik.

F. Implikasi dan Pembelajaran Kebijakan

Perbandingan manajemen kebijakan publik Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada struktur pemerintahan dan kapasitas birokrasi. Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari Singapura melalui penguatan integrasi

perencanaan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pergeseran evaluasi dari output menuju outcome-based evaluation. Selain itu, digitalisasi layanan publik dapat menjadi strategi untuk meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan, dan respons kebijakan (Dunleavy et al., 2006). Namun demikian, kebijakan Indonesia tetap perlu mempertahankan karakter demokratis dengan mendorong partisipasi publik, karena legitimasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat.

Perbandingan manajemen kebijakan publik Indonesia dan Singapura memberikan implikasi penting bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kekuatan sistem koordinasi dan kapasitas implementasi di lapangan. Indonesia menunjukkan kecenderungan kebijakan yang kaya secara partisipatif, namun kompleks secara administratif karena struktur desentralisasi menciptakan variasi pelaksanaan antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem yang multi-level, manajemen kebijakan harus menekankan penyelarasan tujuan, keseragaman indikator hasil, serta mekanisme pengendalian pelaksanaan kebijakan yang jelas agar program tidak berhenti pada rutinitas administratif. Dengan demikian, desain kebijakan di Indonesia perlu dipastikan memiliki kerangka implementasi yang realistis, adaptif, serta kompatibel dengan kapasitas daerah yang berbeda-beda.

Implikasi lain yang dapat diambil adalah pentingnya memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor dalam manajemen kebijakan. Kebijakan publik modern sering bersifat lintas isu dan memerlukan kolaborasi antarlembaga, misalnya kebijakan kesehatan yang membutuhkan dukungan pendidikan, kebijakan ekonomi yang terkait dengan sosial, atau kebijakan lingkungan yang melibatkan perizinan dan tata ruang. Kondisi Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan tumpang tindih kewenangan dapat menurunkan efektivitas implementasi serta memperbesar potensi pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun sistem koordinasi yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berbasis integrasi program, harmonisasi indikator kinerja, dan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat di tingkat operasional kebijakan. Pembelajaran penting dari Singapura adalah kemampuan pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan melalui birokrasi yang profesional dan meritokratis.

Sistem merit menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki kompetensi teknis, loyalitas terhadap tujuan organisasi, dan disiplin kinerja. Dalam konteks Indonesia, reformasi birokrasi dapat diperkuat melalui peningkatan kualitas rekrutmen aparatur, pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, serta promosi yang lebih transparan dan berbasis capaian kinerja. Kebijakan publik akan lebih efektif jika kapasitas birokrasi dibangun secara sistematis, tidak hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi kebijakan berbasis outcome menjadi agenda pembelajaran yang sangat penting. Indonesia selama ini telah memiliki sistem pelaporan kinerja, namun evaluasi sering masih dominan pada output administratif seperti jumlah kegiatan, serapan anggaran, atau dokumen yang dihasilkan. Padahal, indikator outcome seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan, perbaikan mutu pendidikan, dan kepuasan publik terhadap layanan merupakan ukuran yang lebih substantif.

Dengan menggeser orientasi evaluasi ke outcome, pemerintah tidak hanya menilai “apa yang dilakukan”, tetapi juga “apa yang berubah” sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Perubahan orientasi ini akan memperkuat akuntabilitas publik sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Penguatan digitalisasi pemerintahan juga menjadi implikasi

penting dalam pembelajaran kebijakan, terutama dalam konteks modernisasi administrasi publik. Digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi layanan publik, tetapi sebagai proses integrasi data, pemangkasan birokrasi, peningkatan transparansi, serta percepatan pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Singapura menunjukkan bahwa e-government mampu memperkuat monitoring dan evaluasi karena data dapat dilacak secara real time, serta mempermudah akuntabilitas birokrasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat integrasi sistem data pemerintahan lintas sektor dan lintas level pemerintahan agar kebijakan lebih presisi, responsif, dan tepat sasaran.

Namun demikian, pembelajaran dari Singapura tidak dapat diadopsi secara utuh tanpa mempertimbangkan konteks Indonesia yang lebih besar dan plural. Indonesia memiliki dinamika sosial, politik, ekonomi, dan geografis yang lebih kompleks sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang fleksibel dan adaptif. Pada titik ini, Indonesia perlu mengembangkan model manajemen kebijakan yang menyeimbangkan efisiensi birokrasi dan partisipasi publik. Artinya, kebijakan harus tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas, tetapi sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengelola implementasi agar tidak terjadi penurunan kualitas program ketika dijalankan di tingkat daerah. Lebih lanjut, peningkatan kualitas partisipasi publik juga menjadi implikasi penting dalam pembelajaran kebijakan. Partisipasi tidak cukup hanya hadir pada tahap perencanaan, melainkan perlu diperluas pada tahap implementasi dan evaluasi, misalnya melalui mekanisme pengaduan publik yang responsif, audit sosial (social accountability), survei kepuasan layanan, serta keterlibatan komunitas dalam pemantauan program.

Dengan demikian, partisipasi publik dapat berfungsi bukan hanya sebagai legitimasi awal kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen koreksi untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata. Secara keseluruhan, implikasi utama studi perbandingan ini menegaskan bahwa peningkatan manajemen kebijakan publik di Indonesia harus diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi pusat–daerah, profesionalisme birokrasi, evaluasi berbasis outcome, serta pemanfaatan digitalisasi sebagai instrumen tata kelola. Jika agenda tersebut dilakukan secara konsisten, maka kebijakan publik di Indonesia dapat bergerak dari sekadar administrasi program menuju kebijakan yang benar-benar menghasilkan perubahan sosial dan perbaikan kualitas pelayanan publik secara nyata.

Kesimpulan

Studi perbandingan menunjukkan bahwa Singapura unggul dalam manajemen kebijakan publik yang terintegrasi, konsisten, serta berbasis kinerja dan data. Keunggulan tersebut terutama ditopang oleh struktur pemerintahan yang terpusat, birokrasi profesional dan meritokratis, serta sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dan berorientasi pada outcome. Indonesia, di sisi lain, memiliki keunggulan pada ruang demokrasi dan partisipasi publik yang luas, namun menghadapi tantangan dalam koordinasi pusat–daerah, tumpang tindih kewenangan, kesenjangan kapasitas birokrasi antardaerah, serta evaluasi kebijakan yang masih dominan bersifat administratif. Oleh karena itu, penguatan manajemen kebijakan publik di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi kelembagaan, penguatan sistem evaluasi outcome, serta integrasi data melalui digitalisasi pelayanan publik. Studi ini menyimpulkan bahwa manajemen kebijakan publik Indonesia dan Singapura memiliki karakter yang berbeda secara signifikan. Indonesia unggul dalam aspek demokrasi dan ruang partisipasi publik yang luas, namun menghadapi tantangan serius dalam konsistensi implementasi kebijakan akibat kompleksitas desentralisasi, lemahnya koordinasi pusat–daerah, serta kesenjangan kapasitas

birokrasi. Sebaliknya, Singapura unggul dalam perencanaan kebijakan yang terintegrasi, koordinasi kelembagaan yang kuat, implementasi yang disiplin, serta evaluasi kebijakan berbasis data dan berorientasi outcome. Perbedaan struktur pemerintahan dan budaya birokrasi menjadi faktor dominan yang membentuk efektivitas manajemen kebijakan pada kedua negara. Oleh karena itu, penguatan manajemen kebijakan publik di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan evaluasi berbasis outcome, serta integrasi data dan digitalisasi tata kelola kebijakan untuk mempercepat efektivitas pelayanan publik dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Berdasarkan studi perbandingan manajemen kebijakan publik di Indonesia dan Singapura, dapat disimpulkan bahwa perbedaan efektivitas kebijakan di kedua negara sangat dipengaruhi oleh karakter tata kelola pemerintahan, kapasitas birokrasi, serta sistem pengendalian kebijakan. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan sistem desentralisasi memiliki keunggulan dalam keterbukaan partisipasi publik dan ruang deliberasi kebijakan yang luas. Namun, kompleksitas struktur pemerintahan pusat–daerah, tumpang tindih kewenangan, serta ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di berbagai daerah menyebabkan implementasi kebijakan sering tidak konsisten dan menghasilkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan capaian di lapangan. Evaluasi kebijakan di Indonesia juga masih cenderung bersifat administratif, lebih menekankan pencapaian output dibandingkan outcome, sehingga dampak kebijakan terhadap perbaikan kualitas layanan publik belum selalu optimal. Sementara itu, Singapura menunjukkan manajemen kebijakan publik yang lebih terintegrasi dan stabil melalui tata kelola yang terpusat, koordinasi antar lembaga yang kuat, serta birokrasi profesional dan meritokratis. Implementasi kebijakan di Singapura berjalan lebih disiplin karena didukung oleh standar kerja yang jelas, sistem pengawasan yang ketat, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Evaluasi kebijakan juga lebih berorientasi pada hasil dan dampak (outcome) sehingga kebijakan dapat diperbaiki secara cepat dan responsif berdasarkan capaian kinerja yang terukur. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kekuatan tata kelola, efektivitas instrumen implementasi, dan kapasitas evaluasi berbasis data. Implikasi penting bagi Indonesia adalah perlunya memperkuat koordinasi lintas sektor dan pusat–daerah, meningkatkan profesionalitas birokrasi, serta mengembangkan evaluasi kebijakan yang fokus pada outcome dan manfaat nyata bagi masyarakat agar kebijakan publik lebih efektif, konsisten, dan berdampak.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Cheung, A. B. L. (2010). The politics of administrative reforms in Asia: Paradigms and legacies, paths and diversities. *Governance*, 23(2), 257–284.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. *World Development*, 25(4), 481–495.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). Implementing public policy: Governance in theory and practice. *Public Administration*.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems.

Policy Sciences.

- Kim, S., & Lee, J. (2012). E-government and public trust in government: A case of Singapore. *International Review of Administrative Sciences*, 78(2), 245–263.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore. *Policy and Society*, 26(1), 1–18.
- Peters, B. G. (2015). Policy coordination: The role of bureaucracy. *Public Administration Review*.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public management reform: A comparative analysis. *Governance*.
- Quah, J. S. T. (2010). Public administration Singapore-style. *International Journal of Public Administration*.
- Turner, M., Imbaruddin, A., & Sutiyono, W. (2009). Decentralisation in Indonesia: Redesigning the state. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 31(2), 219–236.
- Hood, C. (1983). *The Tools of Government*.
- Salamon, L. M. (2002). *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*.
- Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2007). Understanding public policy through its instruments. *Governance*, 20(1), 1–21.
- Howlett, M. (2011). Designing public policies: Principles and instruments. *Policy Sciences*.
- Peters, B. G. (2000). *Policy Instruments and Public Management*.
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public sector reforms and financial transparency: Experiences from Indonesian local governments. *Public Administration and Development*, 29(4), 282–297.